

Interaksi Sosial Antar Pengelola Hutan dalam Mewujudkan Hutan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Alas Bromo, Kabupaten Karanganyar)

Lisa Putri Atmaja^{1*}, Widiyanto², Putri Permatasari³

^{1,2,3}Departemen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

*Corresponding author: lisaputriatmaja.23@gmail.com

Abstrak

Luas hutan kota yang semakin berkurang dari tahun ke tahun menjadi isu global yang dihadapi negara dunia, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan di Indonesia harus ditingkatkan agar luasan hutan yang terbatas dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga tercapai hutan kota berkelanjutan. Pengelolaan hutan kota agar mencapai keberlanjutan tidak terlepas dari masyarakat yang ada di sekitar hutan yang tergabung dalam *community forestry* salah satunya Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok Tani Hutan merupakan kumpulan petani dan keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial antar pengelola hutan dalam mewujudkan hutan kota berkelanjutan (*sustainable urban forest*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel informan secara purposive dan snowball sampling. Model analisis data yang digunakan adalah menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data diperoleh dari *in-depth interview*, observasi partisipatif dan pengkajian dokumen. Validitas data ditentukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan KHDTK Alas Bromo terjadi interaksi sosial dalam bentuk interaksi sosial antar anggota KTH meliputi kerja sama dan persaingan dan interaksi sosial antara KTH dengan UPT Diklathut UNS dan penyuluh kehutanan meliputi kerja sama, akomodasi, dan pertentangan.

Kata kunci: Berkelanjutan, Hutan kota, Interaksi sosial

Abstract

The area of urban forests that is decreasing from year to year is a global issue faced by world countries, one of which is Indonesia. Therefore, forest management in Indonesia must be improved so that the limited forest area can carry out its functions optimally, so as to achieve sustainable urban forests. The management of urban forests in order to achieve sustainability cannot be separated from the communities around the forests who are members of the communitycommunity forestry one of them is the Forest Farmers Group. Forest Farmers Group is a group of farmers and their families who manage businesses in the forestry sector. This study aims to analyze social interactions between forest managers in realizing sustainable urban forests (sustainable urban forest). The method used is descriptive qualitative with purposive sampling of informants and snowball sampling. The data analysis model used is Miles and Huberman's interactive analysis model including data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The process of collecting data obtained from in-depth interview, participatory observation and document review. Data validity was determined through triangulation of sources and methods. The results showed that in the management of KHDTK Alas Bromo there was social interaction in the form of social interaction between KTH members including cooperation and competition and social interaction between KTH and UPT Diklathut UNS and forestry extension officers including cooperation, accommodation and conflict.

Keywords: Social interaction, Sustainable, Urban forest

PENDAHULUAN

Hutan kota merupakan pohon dan hutan yang berada di sekitar kota dan berguna sebagai pengelola lingkungan perkotaan oleh tumbuhan. Menurut Fabio *et al.* (2016) hutan kota adalah jaringan atau sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan pohon individu yang terletak di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Diproyeksikan bahwa 68% dari total populasi dunia akan tinggal di pusat kota pada tahun 2050, dibandingkan dengan 55% pada tahun 2018 dan 30% pada tahun 1950 (United Nations, 2018). Oleh karena itu, melindungi dan meningkatkan hutan kota telah menjadi komponen kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan kota.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terbesar dan terkaya di Asia, namun berada dalam krisis yang sangat mengkhawatirkan. Menurut PBB Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia, peringkat kedua se-Asia, dan peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki hutan terbesar. Pada sisi lain, Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penebangan liar diduga telah mencapai 17-30 juta m³ per tahun. Oleh karena itu, pengelolaan hutan di Indonesia harus ditingkatkan agar dengan luasan yang ada dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.

Menurut Borelli *et al.* (1997) hutan kota berkelanjutan (*sustainable urban forest*) didefinisikan sebagai hutan untuk memenuhi kebutuhan di bawah kendala lingkungan, kendala sosial, maupun teknologi, kehidupannya dapat selaras antara alam dengan manusia satu sama lain, serta dapat menjaga kualitas hubungan antara manusia dengan alam. Hutan kota yang berkelanjutan (*sustainable urban forest*) penting untuk meningkatkan ketahanan sosial-ekologis dan ekonomi kota. Salah satu hutan kota yang ada yaitu Kelompok Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Alas Bromo. KHDTK Alas Bromo merupakan kawasan hutan kota yang dibina langsung oleh Universitas Sebelas Maret untuk tujuan khusus yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pengelolaan hutan kota agar mencapai keberlanjutan tidak terlepas dari masyarakat yang ada di sekitar hutan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan pendampingan dari lembaga akan mampu menjaga dan mengelola hutan secara baik dan bijak. Pengelolaan hutan kota juga melibatkan masyarakat di sekitar hutan agar keberlanjutan

hutan dapat tercapai melalui *community forestry*. Salah satu *community forestry* untuk menjaga dan mengelola hutan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Apriliani *et al.* (2019) kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kumpulan petani atau warga yang mengelola hasil hutan baik di dalam dan di luar kawasan hutan. Menurut Nikoyan *et al.* (2020) kelompok Tani Hutan memiliki hubungan (relasi) yang erat dengan hutan kota dalam mewujudkan *sustainable urban forest*.

Kelompok Tani Hutan dalam melakukan pengelolaan hutan kota tidak terlepas dari adanya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dan dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-perorangan, kelompok dengan kelompok, maupun perorangan dengan kelompok (Tapi & Makabori, 2021; Harahap, 2020). Hal yang sejalan juga diungkapkan oleh Gillin & Gillin (1954) bahwa interaksi sosial adalah suatu sikap hubungan sosial yang sangat dinamis yang menyangkut antara kelompok dan kelompok atau antara perorangan dengan kelompok manusia. Dua macam proses yang timbul sebagai akibat dari interaksi yaitu “proses asosiatif dan proses disosiatif”. Menurut Gillin & Gillin (1954), proses asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok dan sebuah proses kerjasama serta akomodasi. Proses disosiatif dalam sosiologi adalah proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat dan adanya sebuah proses persaingan dan pertentangan.

Kelompok Tani Hutan yang berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu KTH Alas Bromo. KTH Alas Bromo terbagi menjadi 3 kelompok yaitu KTH Wonosewu, Putri Serang, dan Bromo Lestari. Kelompok Tani Hutan memiliki peranan yang hampir sama, namun terkadang interaksi sosial yang dilakukn oleh kelompok berbeda dalam menjalankan pemanfaatan dan kontribusi pengembangan kawasan hutan. Kelompok ini biasanya melakukan kegiatan atau aktifitas di dalam kawasan hutan dengan terstruktur dan terarah karena sudah menjadi sebuah organisasi masyarakat. Oleh karena itu rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK Alas Bromo) dalam mewujudkan hutan kota berkelanjutan? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK Alas Bromo) Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan hutan kota berkelanjutan.

METODE

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pemilihan lokasi dilakukan dengan cara *purposive* di KHDTK Alas Bromo. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di KHDTK Alas Bromo karena Alas Bromo merupakan satu-satunya kawasan hutan kota di Kabupaten Karanganyar yang dibina oleh Universitas Sebelas Maret sejak tahun 2018 untuk tujuan khusus yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonosewu, Putri Serang, dan Bromo Lestari, anggota KTH, pengelola KHDTK Alas Bromo (UPT Diklathut UNS), dan Penyuluh kehutanan KHDTK Alas Bromo.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil *in deep interview*, sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung, bisa berasal dari penelitian terdahulu atau arsip-arsip. Teknik pengumpulan data melalui *in deep interview*, observasi partisipatif, dan pengkajian dokumen dan arsip. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan berbagai metode pengumpulan data sebagai jalan untuk menguji keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Alas Bromo merupakan satu-satunya hutan di Kabupaten Karanganyar yang berstatus sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di bawah pengelolaan Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu UPT Diklathut UNS. UPT Diklathut UNS merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret di bawah Rektor UNS yang bertugas untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Alas Bromo. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPT Diklathut UNS Bapak DPA.

“Kebetulan sampai sekarang KHDTK-nya Karanganyar cuman ini. Karena KHDTK itu tidak hanya UNS, banyak KHDTK kan ada 3 untuk diklat, litbang, religi dan budaya. Saya lupa Matesih katanya dulu minta KHDTK kan katanya mau tapi kan itu tukar guling. KHDTK itu

seperti di tanah toraja katakanlah untuk religi”. (Wawancara pada Hari Kamis, 16 Februari 2023).

Pengelolaan KHDTK merupakan sistem pengelolaan hutan yang lestari, mandiri, dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. Pengelolaan KHDTK Alas Bromo berfokus pada pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut seperti yang tertera dalam SK Menteri LHK RI Nomor 177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2018.

KHDTK Alas Bromo juga berlokasi di tengah-tengah Kabupaten Karanganyar sehingga termasuk dalam hutan kota. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan KHDTK Alas Bromo harus maksimal dan *sustainable* agar dapat memenuhi fungsinya sebagai hutan kota, kawasan hutan untuk penelitian, dan pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh penyuluh kehutanan di KHDTK Alas Bromo Ibu D bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan kaidah kehutanan agar dapat maksimal.

“Jadi bromo itu milik bersama, boleh dimanfaatin asal dengan izin dan memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan kita dengan kehutanan dengan konservasi”. (Wawancara pada Hari Jumat, 17 Februari 2023).

Awal mula masyarakat dapat mengelola lahan di Alas Bromo yaitu ketika tanaman pokok di Alas Bromo sudah cukup umur sehingga harus ditebang karena sudah tidak produktif lagi. Pohon yang telah ditebang tersebut kemudian akan diremajakan kembali. Fase tersebut dinamakan *land clearing*. Menurut Afnani (2020), *land clearing* merupakan proses pembersihan lahan sebelum menggunakan kembali lahan tersebut untuk berbagai aktivitas, diawali dengan mempersiapkan lahan meliputi penebangan pohon, pembabatan, hingga ke pembakaran. *Land clearing* sehingga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembersihan material hutan meliputi pepohonan, hutan belukar, hingga alang-alang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Kehutanan KHDTK Alas Bromo Ibu D.

“Nah untuk petani sistem kenapa mereka bisa menggarap. Jadi sejarahnya, pohon itu punya umur masa tebang, jadi misal udah umurnya dua puluh tahun mereka ditebang karena enggak produktif lagi. Kalau sonokeling udah umur tiga puluh atau empat puluh tahun ditebang karena nanti diremajakan, saat ditebang itu kan namanya land clearing pembersihan lahan, saat land clearing atau ditebang itu otomatis kan kosong, saat itu lah petani boleh menanam. Itu sekarang ditanami sama kacang, nah sistem bagiannya itu didasarkan pada dulu LMDH, ini dapat si ini, ini dapat si ini dan pakai sampai sekarang. Nah secara dan petani itu menanam itu ya otomatis ya menanam tanaman yang tidak mengganggu tanaman pokok diantaranya tanaman semusim. Nah kan

itu, kalau orang jawa bilang pagar mangkok”. (Wawancara pada Hari Jumat, 17 Februari 2023).

Pengelolaan hutan di Alas Bromo yang melibatkan masyarakat yang diterapkan oleh Perhutani masih bertahan hingga dikelola oleh UPT Diklathut UNS karena menerapkan budaya “pagar mangkok”. Pagar mangkok bermakna perilaku saling berbagi, peduli, dan menjaga di antara orang-orang yang hidup bersama dalam suatu lingkungan. Filosofi Jawa mengungkapkan bahwa *luwih becik pagar mangkok tinimbang pagar tembok* atau dapat diartikan bahwa menjaga hubungan antar masyarakat lebih baik daripada sekedar membangun tembok pembatas antar rumah. Menurut Dhamayanti *et al.* (2019) menyatakan bahwa pager mangkok merupakan budaya saling berbagi yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk makanan tetapi juga tenaga dan barang lainnya.

Pengelolaan hutan kota yang melibatkan masyarakat tidak semata-mata untuk memberikan lahan garapan kepada masyarakat tetapi juga sebagai upaya agar masyarakat mau turut serta dalam menjaga hutan kota. Masyarakat akan lebih banyak menghabiskan waktu di Alas Bromo daripada UPT Diklathut atau penyuluh kehutanan, sehingga masyarakat akan lebih tanggap dan cepat apabila terjadi sesuatu. Ada hubungan saling ketergantungan antara hutan dengan masyarakat sekitar hutan. Pengelola hutan kota di KHDTK Alas Bromo memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan kelestarian hutan meskipun dengan cara yang berbeda. Hutan kota KHDTK Alas Bromo menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut maka interaksi sosial menjadi hal yang penting antar pelaku pengelola hutan kota dalam hal ini Kelompok Tani Hutan (KTH), UPT Diklathut UNS, dan penyuluh kehutanan. Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara KHDTK Alas Bromo dengan masyarakat sekitar dapat terlihat melalui:

A. Respon Masyarakat dengan Adanya KHDTK Alas Bromo

Adanya kebijakan mengenai perubahan status dari hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani menjadi KHDTK yang dikelola oleh UPT Diklathut UNS direspon baik oleh masyarakat. Bagi masyarakat bukan menjadi suatu masalah adanya perubahan status tersebut, yang terpenting bagi mereka yaitu masih dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kota. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak S (50 tahun) pengurus KTH Putri Serang.

“Menerima, itukan anune pemerintah mosok meh menolak, nggih melu seneng. Soale kegiatan uns itu pasti masyarakat sekitar dilibatkan, terutama KTH, MPA. Dadi dijak rembugan bareng-bareng.” (Wawancara pada Hari Jumat, 23 Februari 2023).

Terjemahan:

“Menerima, itukan anunya pemerintah masak mau menolak, ya ikut seneng. Soalnya kegiatannya melibatkan masyarakat sekitar, terutama KTH sama MPA. Jadi diajak berunding bersama-sama.”
(Wawancara pada Hari Jumat, 23 Februari 2023).

Pengelolaan Alas Bromo melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pengelolaan lahan hutan tetapi juga dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KHDTK Alas Bromo. Adanya pelibatan masyarakat secara aktif membuat masyarakat mendukung adanya KHDTK Alas Bromo.

B. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Pengelola KHDTK Alas Bromo bersama masyarakat sekitar membentuk suatu komunitas hutan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH dibentuk UPT Diklathut UNS bermitra dengan penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar pada tahun 2020. Pembentukan KTH didasari oleh kesepakatan antara UPT Diklathut UNS, penyuluh kehutanan yang ada di Alas Bromo dan masyarakat sekitar. KTH yang terbentuk ada 3 yaitu Wonosewu, Bromo Lestari, dan Putri Serang. Adanya pembentukan KTH membawa dampak baik pada anggota karena setiap bulannya KTH memiliki pertemuan rutin. Pertemuan rutin menjadi jembatan anggota untuk lebih berinteraksi satu sama lain.



Gambar 1. Pertemuan Rutin KTH Wonosewu

C. Pembagian Lahan Garapan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) masing-masing memiliki lahan garapan. KTH Wonosewu dan Putri Serang memiliki lahan garapan berupa lahan tegalan. Sementara KTH Bromo Lestari memiliki lahan garapan berupa lahan sadapan pinus dan lahan pisang. Pembagian lahan garapan ini dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Perhutani. UPT Diklathut tidak membagi ulang lahan garapan, tetapi hanya mendata ulang. Masyarakat mengelola lahan garapan yang dikerjakan sekarang berdasarkan lahan yang terakhir masyarakat kerjakan. Hal

tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu D Penyuluh Kehutanan KHDTK Alas Bromo.

“KHDTK sendiri kan gak punya izin tebang dan izin panen gak punya otomatis yang LMDH sekarang jadi KTH itu, itu mereka boleh garap tapi ya di lahan yang terakhir mereka garap. Gitu, makanya kalau kaya yang wonosewu disini itu kan lahan terakhirnya mereka ditebang tahun dua ribu tujuh belas kemudian diremajakan tahun dua ribu sembilan belas.” (Wawancara pada Hari Jumat, 17 Februari 2023).

Masing-masing anggota KTH memiliki luas lahan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap tebangan yang dilakukan oleh Perhutani luasnya berbeda-beda dan jumlah masyarakat yang mau mengelola lahan juga berbeda-beda. Perhutani biasanya menyerahkan pembagian lahan kepada masyarakat, kemudian masyarakat melakukan “lotre” untuk membagi setiap individu mendapatkan lahan pada blok berapa. Masyarakat dalam mengelola lahan garapan mengandalkan pengairan dari air hujan, sehingga hanya bisa menanam dua kali dalam satu tahun.



Gambar 2 Petak Lahan di KHDTK Alas Bromo

D. Pelanggaran Batas-Batas Wilayah Lahan Garapan

Setiap anggota KTH sudah memiliki lahan garapan masing-masing, tetapi beberapa anggota KTH ada juga yang mengerjakan lahan di luar lahan garapannya dengan kata lain melanggar batas wilayah yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan karena anggota KTH sama-sama bersaing untuk dapat mengelola lahan garapan sebanyak mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat mencari penghasilan tambahan melalui menambah lahan garapan yang dikerjakan. Beberapa anggota KTH awalnya hanya membersihkan lahan kosong di sekitar lahan garapannya, setelah dibersihkan kemudian ditanami tanaman semusim seperti lahan pada umumnya. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena lahan garapan yang ada di KHDTK Alas Bromo terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak DPA

Kepala UPT Diklathut UNS bahwa memang ada beberapa masyarakat yang membuka lahan baru untuk ditanami.

“Walaupun satu atau dua misalkan atau ada yang nanem dalam tanpa kutip buka lahan lah atau bawahnya udah diolah ditanemni di situ, singkong atau rumput kadang-kadang di data kita tidak ada.”
(Wawancara pada Hari Kamis, 16 Februari 2023).

E. Adanya Hak, Kewajiban, dan Peraturan dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat diperbolehkan untuk mengolah lahan yang ada di Alas Bromo dengan penanaman agroforestry di sekitar tanaman pokok untuk KTH Wonosewu dan Putri Serang. Masyarakat yang tergabung dalam KTH Bromo Lestari diperbolehkan untuk menyadap tanaman pokok yaitu tanaman pinus. KTH disamping diperbolehkan mengolah lahan juga memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaga KHDTK Alas Bromo dari gangguan dan perusakan. Anggota KTH baik Wonosewu, Bromo Lestari, maupun Putri Serang mengetahui mengenai hak, kewajiban, dan peraturan yang harus dijalankan oleh masing-masing pengelola Alas Bromo. Anggota KTH menyadari bahwa keamanan dan kelestarian Alas Bromo menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya UNS sebagai pengelola atau masyarakat sekitar saja. Apabila ada yang merusak KHDTK Alas Bromo akan ada sanksi tersendiri. Hak, kewajiban, dan peraturan antara pengelola Alas Bromo (UPT Diklathut UNS) dan KTH juga tercantum dalam Nota Kesepakatan Kerja sama (NKK). NKK tersebut ditandatangani oleh UPT Diklathut UNS, Ketua KTH, penyuluh kehutanan, dan kepala desa terkait.

F. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Hutan

Interaksi KHDTK Alas Bromo dengan masyarakat sekitar selain ditunjukkan dengan pembentukan KTH, adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pengelola, adanya peraturan, juga ditunjukkan dengan adanya sistem bagi hasil. Bagi hasil tersebut berlaku untuk KTH yang mengelola lahan tegalan maupun lahan sadapan. Bagi hasil untuk lahan tegalan maupun lahan sadapan berupa 90% untuk petani dan 10% dikumpulkan ke KTH. Pembagian 10% tersebut akan diberikan 60%-nya untuk kas KTH dan 40%-nya diberikan kepada KHDTK Alas Bromo.

G. Konflik Antar Pengelola KHDTK Alas Bromo

Hubungan antara KHDTK Alas Bromo dengan KTH juga terjadi konflik di dalamnya. Masyarakat terkadang menentang atau memprotes kebijakan yang

dikeluarkan oleh KHDTK Alas Bromo secara terang-terangan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu D penyuluh kehutanan di KHDTK Alas Bromo.

“Masalah parkirnya itu jadi masalah terkadang, misal disini ada kegiatan parkirnya dipegang sama sinongko, nanti yang baladan marah, delingan marah. Makanya dibentuknya seperti itu tu kenapa biar ini dipegang sama MPA, dipegang sama KTH ,dipegang sama Gapoktan. Karena apa di dalam MPA itu sudah ada perwakilan dari orang-orang KTH.” (Wawancara pada Hari Jumat, 17 Februari 2023).

Konflik yang pernah terjadi di KHDTK Alas Bromo yaitu mengenai kebijakan pemegang parkir pada saat Alas Bromo mengadakan kegiatan. Awal mulanya pengelolaan parkir diserahkan pada satu KTH saja, tetapi hal tersebut menimbulkan pertentangan dengan KTH yang lain. Beberapa masyarakat di luar KTH yang diberikan tanggung jawab parkir merasa tidak terima karena satu KTH mendapatkan pemasukan dari parkir dan yang lainnya tidak. Sehingga UPT Diklathut UNS dan penyuluh kehutanan memberikan kebijakan parkir kepada komunitas MPA (Masyarakat Peduli Api) KHDTK Alas Bromo.

Bentuk interaksi sosial menurut Gillin & Gillin (1954), dibedakan menjadi dua yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal yang positif. Sedangkan menurut Setiarsa (2018), interaksi sosial yang bersifat disosiatif yaitu interaksi sosial yang mengarah atau menghasilkan hal yang negatif. Berdasarkan interaksi yang terjadi di KHDTK Alas Bromo ditemukan bentuk interaksi berupa:

Tabel 1. Interaksi KHDTK alas bromo dengan masyarakat sekitar

Jenis	Asosiatif	Disosiatif	Deskripsi
Antar KTH	Kerja sama	Persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama: saling bekerja sama menaati peraturan dan menjaga tanaman agar tetap tumbuh • Persaingan: sama-sama bersaing untuk menanam tanaman hingga melanggar batas-batas lahan garapan
Antara KTH dengan UPT Diklathut UNS dan penyuluh kehutanan	Kerja sama dan akomodasi	Pertentangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama: adanya pembentukan KTH, adanya pembagian hak dan kewajiban masing-masing pengelola, adanya peraturan yang harus ditaati, dan adanya sistem bagi hasil • Pertentangan: ada konflik antar pengelola • Akomodasi: adanya penyelesaian konflik

Sumber: Analisis Data Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antar pengelola KHDTK Alas Bromo dibedakan menjadi dua yaitu interaksi antar KTH dan interaksi KTH dengan UPT Diklatut UNS dan penyuluh kehutanan. Interaksi antar KTH berupa kerja sama dan persaingan. Interaksi antara KTH dengan UPT Diklatut UNS dan penyuluh kehutanan berupa kerja sama, pertentangan, dan akomodasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk interaksi sosial yang terjadi di KHDTK Alas Bromo dibedakan menjadi dua yaitu bentuk interaksi sosial antar KTH meliputi kerja sama dan persaingan, tetapi lebih cenderung pada kerjasama karena masyarakat memiliki rasa kekeluargaan dan saling menjaga satu sama lain. Bentuk interaksi sosial antara KTH dengan UPT Diklatut UNS dan penyuluh kehutanan meliputi kerja sama, akomodasi, dan pertentangan, tetapi lebih cenderung pada kerja sama karena masyarakat dan hutan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Interaksi sosial antar KTH akan mempengaruhi interaksi KTH dengan pengelola hutan lainnya. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu diharapkan intensitas kegiatan yang melibatkan 3 KTH Alas Bromo menjadi lebih banyak, sehingga pertemuan yang melibatkan ketiga KTH menjadi meningkat dan hubungan relasi yang tercipta juga semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnani, B. (2020). *Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat untuk Land Clearing Pada PT Mujur Agung Sukses Berbasis Alat Berat*.
- Apriliami, G., Ichsan, A. C., & Setiawan, B. (2019). Analisis Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu Empon-Empon pada Kelompok Tani Hutan Alam Puncak Semaring Desa Mekar Sari Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, 9(1), 11–18.
- Borelli, S., Salbit, F., & Wolf, K. L. (1997). A MODEL OF URBAN FOREST Related papers. *Journal of Arboriculture*, 23(1), 17–30.
- Dhamayanti, R., Muhammad, A., & Petrus, A. (2019). Pagar Mangkok Sebagai Local Genius Untuk Mempererat Hubungan Sosial Masyarakat Kampung Cyber Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 3(2), 122–131.
- Fabio, S., Borelli, S., Conigliaro, M., & Chen, Y. (2016). Guidelines on Urban and Peri-Urban Forestry. In *FAO*. FAO.
- Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1954). Cultural Sociology. In *Cultural sociology. An Introduction*. New York: The Macmillan Company.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Nikoyan, A., Kasim, S., Uslinawaty, Z., & Yani, R. (2020). Peran dan Manfaat Kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. *Jurnal Perennial*, 16(1), 34–39.
- Setiarsa, S. (2018). Harmoni dalam “?”: Sebuah Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural.” *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.30651/lf.v2i2.2209>
- Siti Rahma Harahap. (2020). Proses Interaksi Sosial di Tengah Pandemi Virus Covid 19. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 11(1), 45–53.
- Tapi, T., & Makabori, Y. Y. (2021). Program Pembangunan Kampung: Perspektif Fungsional dan Konflik dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Suku Arfak di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Triton*, 12(2), 27-37.
- United Nations. (2018). *World Urbanization Prospects The 2018 Revisions*. New York: Department of Economic and Social Affairs. <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>